

3.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2019

Hasil pembahasan DPRD Kabupaten Wonosobo atas LKPJ Bupati Wonosobo Tahun 2019 memberikan catatan-catatan dan rekomendasi yang sifatnya strategis untuk dipedomani oleh Bupati dan perangkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya. Catatan dan Rekomendasi tersebut sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah selama tahun 2020.

Uraian rekomendasi, dan tindak lanjut selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.1

**Rekomendasi DPRD Kabupaten Wonosobo
atas LKPJ Tahun 2019 dan Tindak Lanjutnya pada Tahun 2020**

No.	Rekomendasi	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut
1	2	3	4
1	Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Daerah 2019		
	Data perkembangan investasi daerah pada deskripsi kondisi makro ekonomi	DPMPTSP	Direalisasikan lewat Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perizinan
2	Indikator Pembangunan Sosial (Kesejahteraan Masyarakat)		
	1 menjaga kondisi laju pertumbuhan ekonomi daerah		
	a meningkatkan investasi daerah	DPMPTSP	Direalisasikan lewat Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi kegiatan Fasilitasi Penyusunan Pra FS Potensi Investasi
	b menjaga tingkat konsumsi masyarakat	Bagian Perekonomian dan SDA	Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tetap mendorong keleluasaan masyarakat dalam hal melaksanakan kegiatan Ekonomi dengan berbagai kebijakan. Sektor sektor vital yang mendorong pertumbuhan ekonomi seperti pasar, pusat ekonomi kreatif masyarakat serta akses perhubungan berupa jalan dan terminal tetap diberlakukan buka di tengah pandemi dengan menerapkan Protokol Kesehatan.
	c meningkatkan kualitas belanja pemerintah yang lebih produktif	Bagian Perekonomian dan SDA	Perangkat daerah berupaya melaksanakan kegiatan belanja yang memiliki dampak luas dan langsung terhadap produktivitas ekonomi warga. Misalnya kegiatan budidaya perikanan, fasilitasi pembentukan destinasi wisata

No.	Rekomendasi	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut
			desa yang baru (kawasan perdesaan Margomarem).
	d meningkatkan infrastruktur pendukung agar aksesibilitas dan kelancaran aktivitas ekonomi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	DPUPR	Perencanaan penanganan jalan prioritas penghubung pusat-pusat layanan dengan pendekatan ruas tuntas.
2	Perumusan kebijakan untuk mengantisipasi pandemic Covid-19 yang akan berdampak stagnannya ekonomi nasional dan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat		
	a kebijakan APBD Perubahan 2020 dapat menjadi salah satu solusi taktis atas dampak dari Covid-19.	Bappeda	Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 dalam dokumen RKPD Perubahan 2020 diinternalisasikan dalam prioritas pembangunan
	b diantisipasi analisis dampak dari macetnya ekonomi akan berakibat pada meningkatnya tingkat kriminalitas.	Bagian Perekonomian dan SDA	Kebijakan penanganan dampak ekonomi dilaksanakan melalui : a. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah dalam mendukung penanganan dampak COVID-19. b. Fasilitasi usaha pariwisata, seni budaya dan ekonomi kreatif dalam tatanan normal baru akibat Covid-19. c. Padat karya pada DPU-PR. d. Gerakan Bangga Bela Beli Produk Wonosobo.
3	strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang orientasinya untuk penurunan jumlah orang miskin di Kabupaten Wonosobo belum cukup efektif mencapai tujuannya		
	a strategi dan pendekatan program/ kegiatan yang orientasinya untuk penanggulangan kemiskinan yang selama ini diyakini belum efektif mengurangi penduduk miskin terus dievaluasi	Bappeda	setiap tahun selalu diadakan evaluasi program penanggulangan kemiskinan
4	fokus kepada pemberdayaan desa agar desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru		
	a kebijakan pemanfaatan dana desa dan sumber lainnya untuk kegiatan yang lebih produktif, pengelolaan sumber dana harus benar-benar	Dinsospermasdes	Pada tahun 2020 telah dilaksanakan pendampingan pembentukan pembangunan kawasan pedesaan (PKP) Watumalang melalui rapat –

No.	Rekomendasi	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut
	mampu menstimulus perekonomian desa, infrastruktur publik desa dan perbaikan kualitas SDM ke arah lebih baik.		rapat koordinasi tingkat kabupaten dan musyawarah antar desa.
3	Evaluasi kinerja berdasarkan Misi daerah (Indikator Kinerja Utama)		
1	Pemerintah daerah cq OPD terkait bekerja keras dan fokus pada upaya pencapaian 9 indikator yang belum tercapai		
	a Indeks Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	• sosialisasi secara masif tentang program pelaksanaan RB • sinergitas program dan evaluasi secara terpadu • menciptakan sistem untuk memaksa adanya perubahan pola pikir/ <i>mind set</i> • melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di semua PD
	b PDRB ADHB (juta rupiah/tahun)	Bagian Perekonomian dan SDA	Dalam upaya menekan laju inflasi serta meningkatkan daya beli masyarakat, Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengambil Langkah Strategis dan nyata melalui Kebijakan Gerakan Bangga Bela Beli Produk Lokal Wonosobo berupa: Gerakan Bangga bela beli Produk Pertanian Wonosobo, Gerakan Bangga Bela Beli Produk UMKM Wonosobo, Deklarasi dan Gerakan ASN, Pemerintah Desa, Karyawan BUMN dan BUMD menggunakan Batik Wonosobo setiap hari Kamis, Gerakan Belanja di Pasar Tani Wonosobo). Gerakan ini dapat meningkatkan Daya Beli Masyarakat dan meningkatkan Pendapatan masyarakat lokal Wonosobo. Namun Pada Tri Wulan I tahun 2020 Kabupaten Wonosobo mengalami Deflasi yang dipicu dari anjloknya harga sejumlah komoditas hasil Pertanian serta menurunnya daya Beli Masyarakat, sehingga kemudian Kebijakan Gerakan Bangga Bela Beli Produk Pertanian Wonosobo dapat membantu menstabilkan harga
	c Laju Inflasi	Bagian Perekonomian dan SDA	

No.	Rekomendasi	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut
			komoditas pertanian dan meningkatkan pendapatan petani. Pada akhirnya daya beli masyarakat sudah mulai membaik Pada triwulan IV Tahun 2020.
	d Jumlah cabang olahraga yang berprestasi tingkat nasional	Disdikpora	Melakukan pembinaan melalui pengurus masing-masing cabang olah raga. Namun demikian sehubungan dengan Pandemi Covid-19, tidak ada penyelenggaraan event olah raga yang menjadi ajang untuk meraih prestasi baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.
	e Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	BPPKAD	Kondisi kapasitas fiskal daerah saat ini memang masih bergantung pada dana transfer dari APBN. Akan tetapi upaya untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah terus menerus dilakukan.
	f Angka Kematian Ibu	Dinkes	Upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dilakukan dengan melakukan sweeeping K1 dan K4 serta pemantauan pada ibu hamil resiko tinggi. Penyediaan rumah tunggu persalinan.
	g Prevalensi Balita Gizi kurang	Dinkes	Pembentukan pos pemulihan gizi sebagai sarana pembelajaran, konseling gizi dan pemantauan status gizi ibu hamil, bayi dan balita gizi kurang.
	h Cakupan jaminan kesehatan tenaga kerja	Dinakerintrans	Upaya perluasan sasaran jaminan kesehatan tenaga kerja terus dilakukan termasuk jaminan ketenagakerjaan.
	i Persentase Penanganan Sampah	Dinas LH	1. Adanya operasional TPA 2. Pembangunan dan penyempurnaan TPST di beberapa desa /kelurahan/ kecamatan 3. Penyediaan sapras persampahan, pengadaan alat angkut sampah
2	evaluasi dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran OPD agar berorientasi pada indikator kegiatan		

No.	Rekomendasi	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut
4	Kinerja berdasarkan Dokumen Anggaran Daerah		
1	evaluasi terhadap semua regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.	BPPKAD	1. Tahun 2020 telah dilaksanakan penyusunan kajian Roadmap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari aspek : a. Regulasi; b. Kelembagaan; c. Kebutuhan Sumber Daya; d. Formulasi Pemetaan Potensi; dan e. Perumusan strategi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Hasil kajian : a. Perlu melakukan pemutakhiran terhadap Regulasi yang menjadi dasar pemungutan maupun tata cara teknis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. Dalam rangka optimalisasi pendapatan, secara kelembagaan perlu dipertimbangkan untuk melakukan pemisahan antara perangkat daerah yang pengelola pendapatan daerah dengan pengelola keuangan dan aset daerah; c. Perlu melakukan penambahan sumber daya manusia dalam pemungutan dan pengawasan; d. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan maupun pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; e. Perlu melakukan pemetaan potensi riil pada masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; f. Perlu melakukan integrasi
2	kajian data potensi untuk setiap jenis obyek pajak dan retribusi daerah sehingga akan diperoleh target yang rasional dan terukur serta proyeksi yang bisa dicapai berdasarkan potensi riilnya.	BPPKAD	
3	sosialisasi dan publikasi kebijakan pengelolaan pendapatan daerah melalui media elektronik maupun media cetak, dan media lainnya, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat taat bayar pajak dan retribusi daerah.	BPPKAD	
4	memperbaiki sarana dan prasarana pelayanan serta peningkatan fasilitas pendukung lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.	BPPKAD	
5	pemberian penghargaan bagi Organisasi Perangkat Daerah pengelola pendapatan dengan mempertimbangkan beberapa indikator capaian seperti: target pendapatan terhadap potensi, tingkat pencapaian, realisasi, SOP, tertib administrasi jenis PAD dan tingkat kesulitan.	BPPKAD	
6	optimalisasi penerimaan pendapatan baik pajak maupun retribusi antara lain dengan penyesuaian tarif berdasarkan regulasi yang baru serta penggalian potensi obyek pendapatan yang baru.	BPPKAD	
7	melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (perbankan, swasta, badan hukum/ masyarakat).	BPPKAD	
8	meningkatkan pengawasan antara lain dengan menggunakan alat bantu POS dan Tappingbox yang dipasang pada tempat usaha hotel, restoran dan tempat	BPPKAD	

No.	Rekomendasi	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut
	hiburan (karaoke).		data base objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan data perijinan 2. Pada tahun 2020 telah dilakukan sosialisasi dan survei lokasi pemasangan Tappingbox yang direncanakan sasaran pemasangan pada hotel di Kabupaten Wonosobo dalam rangka pengawasan dan optimalisasi penerimaan pajak hotel. 3. Kegiatan pemasangan Tappingbox merupakan hasil kerjasama dengan Bank Jateng, dimana Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan survei lokasi sasaran pemasangan sedangkan peralatan disediakan oleh Bank Jateng.
9	apresiasi atas kenaikan Dana Insentif Daerah dalam APBN yang naik menjadi Rp. 30 M tahun 2019 dari 8,7M tahun 2018, DID merupakan instrument fiskal Pemerintah Pusat dalam mendorong Pemerintah Daerah lebih berprestasi, kreatif, inovatif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan.	BPPKAD	Pagu alokasi DID berdasarkan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui regulasi yang berlaku. Salah satu faktor yang mendorong kenaikan DID ini kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan pada sektor pelayanan dasar publik (pendidikan dan kesehatan).
10	pencermatan penurunan pertumbuhan belanja daerah menjelang akhir periode RPJMD.	BPPKAD	Belanja daerah dalam APBD ditentukan oleh besarnya pendapatan daerah dan pembiayaan penerimaan.
11	peningkatan derajat transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		
	a Menyediakan informasi data/dokumen APBD kepada masyarakat secara rutin/berkala dalam website pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo.	BPPKAD	Setiap tahun secara rutin/berkala sudah menyediakan informasi dokumen APBD kepada masyarakat pada website bppkad.wonosobokab.go.id
	b Meningkatkan mutu proses dan output Musrenbang di semua tingkatan (musrenbang desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten) agar arah dan kebijakan APBD tidak menyimpang dari	Bappeda	Secara makro arah kebijakan APBD didasarkan pada arah kebijakan yang ada dalam dokumen RKPD dan RPJMD. Dibutuhkan komitmen kuat untuk mengawal mutu proses dan output Musrenbang.

No.	Rekomendasi	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut
	aspirasi/ kebutuhan masyarakat.		
	c Meningkatkan mutu proses dan output reses DPRD dan forum OPD agar perencanaan daerah cukup komprehensif dan aspiratif (sinkron antara aspirasi masyarakat, DPRD dan kebutuhan OPD).	Bappeda	• Pengaturan ulang jadwal reses DPRD agar sinkron dengan tahapan forum OPD. • Adanya aplikasi e-aspirasi yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.
	d Melibatkan semakin banyak stakeholder dalam seluruh siklus anggaran (perencanaan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran).	Bappeda	Dalam setiap tahap pelaksanaan perencanaan baik mulai proses di desa/ kelurahan, kecamatan, forum perangkat daerah dan kabupaten selalu melibatkan partisipasi masyarakat, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya.
	e memperhatikan komponen-komponen anggaran kinerja		
	a) Indikator Kinerja, Standar Harga, Analisis Standar Belanja, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyusunan APBD.	BPPKAD	Pada APBD 2020, penyusunan belanja sudah menerapkan Standar Satuan Harga, Indikator Kinerja dan SPM dalam Penyusunan APBD
	b) Penajaman belanja daerah tahun 2020 perubahan pada skala prioritas program dan kegiatan yang target kinerjanya yang belum terpenuhi.	BPPKAD	Adanya kondisi Pandemi Covid-19 mempengaruhi struktur APBD Perubahan 2020
6	Meningkatkan kapasitas belanja modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi rakyat dan perbaikan pelayanan publik.	BPPKAD	Hal ini dapat dilakukan apabila belanja modal menjadi prioritas utama dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
7	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah melalui penerapan standar harga serta intensifikasi pengawasan baik oleh aparaturnya pengawasan fungsional maupun masyarakat.	Bagian Adbang & Inspektorat	• Pemerintah Kabupaten Wonosobo secara rutin telah menyusun SSH, namun belum dengan kelengkapan ASB, ke depan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentunya akan menyusun ASB dimaksud. Terhadap SSH yang telah disusun juga dilakukan reviu sebelum dibakukan dalam peraturan bupati. • Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap ketentuan harga berpedoman pada indeks

No.	Rekomendasi	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut
			daerah (SSH). Kualitas pengawasan yang belum optimal juga dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah APIP, besaran anggaran pengawasan dan masih perlu peningkatan kompetensi sehingga hal efisiensi dan efektifitas belanja daerah belum tercapai. Terhadap hal tersebut usulan penambahan jumlah APIP, anggaran pengawasan terus diupayakan, serta manajemen pengawasan terus dilakukan perbaikan. Untuk pengawasan masyarakat pemerintah kabupaten wonosobo memperbanyak ruang/ sarana aduan melalui platform yang ada.
5	Capaian Berdasarkan Aspek Pembangunan Daerah		
	1 Perlunya kejelasan tentang jumlah Indikator kinerja sebagai obyek penilaian, baik dalam RPJMD, RKPD maupun LKPJ, sehingga tingkat ketercapaiannya bisa diukur setiap tahunnya.	Bappeda	Jumlah indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen RPJMD, RKPD dan LKPJ sama.
	2 Perlunya transparansi mengenai penyebab adanya beberapa indikator yang tidak bisa diukur maupun terhadap 83 Indikator RKPD yang tidak dilaporkan capaiannya dalam LKPJ.	Bappeda	Bappeda senantiasa memberikan pemahaman ke setiap perangkat daerah terhadap indikator kinerja.
	3 Perlunya pemahaman setiap OPD terhadap indikator kinerja urusan, sehingga bisa menyajikan data yang benar dan valid.	Bappeda	Komitmen kepala perangkat daerah terhadap ketercapaian indikator telah dilakukan pada perjanjian kinerja
	4 evaluasi rencana kegiatan dan anggaran OPD agar berorientasi pada indikator kegiatan.	Bappeda	evaluasi rencana kegiatan dan anggaran perangkat daerah disusun berdasarkan indikator kegiatan.
	5 komitmen pimpinan OPD bahwa pada akhir periode RPJMD ketercapaian indikator telah mencapai 100%	Bappeda	Komitmen kepala perangkat daerah terhadap ketercapaian indikator telah dilakukan pada perjanjian kinerja
	6 Penilaian kinerja, dalam LKPJ 2018 menggunakan tercapai dan tidak tercapai, sementara dalam LKPJ 2019	Bappeda	Perubahan penilaian kinerja pada LKPJ 2019 didasarkan pada amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No.	Rekomendasi	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut
	menggunakan degradasi Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah.		
7	indikator urusan yang targetnya telah tercapai dalam LKPj 2019 maka dalam RKPD 2021 harus ditargetkan lebih tinggi atau setidaknya sama.	Bappeda	Target dalam RKPD 2021 disesuaikan dengan target RPJMD tahun 5 (2021), dimana target akhir RPJMD tidak dapat diubah
8	penetapan target yang realistis dan terukur atas berbagai indikator urusan, sehingga tidak ada indikator dengan target terlalu rendah ataupun yang terlalu tinggi.	Bappeda	penetapan target tahunan didasarkan pada capaian indikator pada tahun-tahun sebelumnya melalui penghitungan dengan metode proyeksi
9	efisiensi dan efektifitas program/kegiatan, sehingga tingkat keterserapan anggaran akan paralel dengan ketercapaian kinerja.	Bagian Adbang Setda	Bagian Adbang secara periodik bulanan telah melakukan monitoring kesesuaian target kinerja dengan serapan anggaran
6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
1	Kawasan Alun-Alun yang menjadi ruang publik agar tetap dipertahankan sehingga tidak dijadikan tempat berjualan Pedagang Kaki Lima (PKL).	Satpol PP	Pengawasan alun-alun yang menjadi kawasan publik telah dilaksanakan tahun 2019 dan 2020
2	Penegakan Perda Tempat Hiburan karena disinyalir ada beberapa tempat hiburan/karaoke yang masih beroperasi.	Satpol PP	Penegakan perda dan tempat hiburan/karaoke telah diputuskan di Tingkat Mahkamah Agung pada tahun 2020
3	Penertiban masalah ijin bangunan yang melanggar ROI Jalan.	Satpol PP	Penegakan ijin bangunan ROI jalan telah dilaksanakan tahun 2020
4	Penertiban Menara BTS yang sudah habis masa berlakunya dan menara tower yang didirikan tanpa ijin.	Satpol PP	Penertiban BTS yang sudah habis masa berlakunya dilaksanakan pada tahun 2020 dengan koordinasi dengan DPMPSTP Kabupaten Wonosobo"
5	Mewaspada kasus penyakit masyarakat (Peredaran miras dan Narkoba).	Satpol PP	Kasus penyakit masyarakat (peredaran miras) telah disidangkan pada tahun 2019 dan 2020
6	Monitoring terhadap perkembangan paham-paham ideologi dan radikalisme yang tidak sesuai dengan Pancasila.	Badan Kesbang	Monitoring terhadap perkembangan paham-paham ideologi dan radikalisme yang tidak sesuai dengan Pancasila telah dilaksanakan pada tahun 2020 berkoordinasi dengan pihak terkait.
7	Urusan Administrasi Kependudukan		

No.	Rekomendasi	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut
1	perlu adanya langkah-langkah strategis guna mencapai target indikator yang diharapkan seperti pemberian Akta Kelahiran bagi semua penduduk fokusnya agar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga seperti orang tua/jompo mungkin sudah tidak membutuhkan akta kelahiran.	Disdukcapi	Telah mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan Rumah Sakit, Klinik bersalin, IBI, Tim Penggerak PKK dan lembaga lainnya.
2	untuk meningkatkan Rasio kepemilikan Akta Kematian dan Kartu Identitas Anak agar ditingkatkan kerjasama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan pihak terkait seperti Sekolah dalam rangka identifikasi sasaran.	Disdukcapi	1. Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan (Jemput bola ke 24 sekolah di wilayah Kecamatan Garung) 2. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Koordinasi lintas sektoral tidak terlaksana akibat larangan tatap muka di masa pandemi COVID-19, dan digantikan dengan pembagian media informasi/banner kepada 15 kecamatan) 3. Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
3	dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan di tingkat Kecamatan agar ada peningkatan dukungan sarana prasarana seperti mesin Cetak KTP di Kecamatan	Disdukcapi	1. Kegiatan Operasional dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan KTP elektronik (pemeliharaan jaringan dan unit di 15 kecamatan) 2. Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan, Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak (pengadaan blangko kependudukan untuk 15 kecamatan)
8	Urusan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1	perlu adanya Peningkatan Fasilitas BPD di tingkat Kecamatan.	Dinsospermasdes	Sudah dilaksanakan peningkatan kapasitas BPD secara berkesinambungan di 5 Kecamatan. Tahun 2020 dilaksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan fungsi legislasi BPD terkait perubahan RKP Desa dan

No.	Rekomendasi	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut
			perubahan penjabaran APBDesa termasuk di dalamnya untuk pelaksanaan penanggulangan Covid-19 serta BLT melalui dana transfer ke desa.
2	untuk mengantisipasi timbulnya gejala masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial maka perlu adanya evaluasi data DTKS agar tepat sasaran dan tidak terjadi duplikasi penerimaan	Dinsospermasdes	Sudah dilaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kemiskinan yang diawali dengan pelatihan PCL untuk admin desa dan juga dilakukan musyawarah kelurahan/ desa untuk pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selanjutnya akan diusulkan melalui SIKS NG dan rakor verifikasi validasi DTKS
3	dalam rangka pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo diperlukan adanya keseragaman data untuk lebih memperjelas jumlah sasaran pengentasan kemiskinan	Dinsospermasdes	Penyediaan data melalui DTKS melalui aplikasi SIKS NG dan dilakukan verifikasi dan validasi 4 kali dalam satu tahun
4	dalam rangka untuk mewujudkan Akuntabilitas dan Produktifitas Perangkat Desa, maka perlu disusun E Kinerja (E-KIN) bagi Perangkat Desa.	Dinsospermasdes	a. Tahun 2020, pengembangan sistem informasi desa sebagai sistem penopang untuk meningkatkan kualitas pemerintah dan aparatur desa yang profesional dan transparan. b. Penyusunan raperbup tentang pengaturan jam kerja, seragam kerja serta cuti bagi Kades dan Perangkat Desa yang di dalamnya juga akan mengatur kinerja bagi Kades dan Perangkat Desa sebagai bahan untuk penyusunan pemberian dan besaran penghasilan tetap bagi Kades dan Perangkat Desa.
9	Urusan Komunikasi dan Informatika		
1	agar semua SKPD dapat menerapkan Tata Naskah Dinas Elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas kinerja birokrasi.	Diskominfo	Membandingkan dan ujicoba Sistem Aplikasi TNDE yang dikembangkan oleh Kementerian Kominfo dengan Aplikasi serupa yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2	dukungan akses internet untuk semua OPD agar bisa ditingkatkan untuk	Diskominfo	Perluasan jaringan fiber optik untuk <i>backbone</i> utama dalam kota,

No.	Rekomendasi	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut
	mendukung kegiatan-kegiatan yang menggunakan akses internet		sedangkan untuk OPD yang berada di luar wilayah kota seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai ujicoba sistem jaringan baru demikian juga untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
10	Urusan Penanaman Modal		
	1 Guna meningkatkan Investasi dan Penanaman Modal di Kabupaten Wonosobo agar OPD terkait lebih fokus pada upaya peningkatan dan kegiatan pengawalan investasi kepada calon investor, serta melakukan study banding ke Daerah yang berhasil dalam pengembangan investasi dan penanaman modal	DPMPTSP	Rekomendasi ini belum dapat dilaksanakan pada tahun ini dikarenakan Pandemi Covid-19 dan rekomendasi tersebut akan dilaksanakan pada tahun mendatang sesuai dengan keadaan/situasi yang memungkinkan
11	Urusan Kearsipan		
	1 perlu dilakukan langkah-langkah untuk memenuhi target yang ditetapkan	Dinas Arpusda	Langkah langkah untuk memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2020 belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan pandemi Covid-19 dan anggaran yang ditetapkan dipangkas untuk penanganan Covid-19. Namun demikian sosialisasi dan pembinaan kearsipan telah kami laksanakan tahun 2020 dengan jemput bola ke wilayah Kecamatan dan Pedesaan untuk mengetahui lebih dekat tentang pengelolaan kearsipan.
12	Urusan Perencanaan Pembangunan		
	1 perlu adanya efisiensi anggaran dan kebijakan untuk menjawab problematika kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.	Bappeda	Pemerintah Kabupaten Wonosobo senantiasa berupaya menerapkan konsep HITS (Holistik, Integrasi, Tematik dan Spasial) dalam hal penanggulangan kemiskinan, salah satunya dengan adanya Replikasi Program 1 Perangkat Daerah 1 Desa Dampingan. Sasaran dari kegiatan juga diarahkan untuk menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

No.	Rekomendasi	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut
2	adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten Wonosobo yang menyebabkan potensi meningkatnya jumlah angka kemiskinan maka perlu dirumuskan langkah-langkah serius untuk mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.	Bappeda	Bappeda telah melakukan pengawalan kebijakan penanganan Covid-19 yang tertuang dalam RKPD Perubahan 2020 maupun dalam RKPD 2021.
3	Bappeda hendaknya memastikan bahwa penyusunan Rencana kerja dan Anggaran OPD berkorelasi dengan misi kepala daerah	Bappeda	Bappeda telah mengarahkan perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan visi misi kepala daerah
13	Urusan Keuangan		
1	dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah perlu adanya inovasi serta intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah seperti pajak restoran dan home stay, penyesuaian Harga NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dan penerapan Pajak sistem Online untuk memudahkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.	BPPKAD	Pada sektor PBB dan BPHTB pada tahun 2020 dilakukan pemutakhiran data wajib pajak, sosialisasi e-PBB, integrasi BPHTB dengan BPN serta perubahan Perbup tentang PBB.
2	Sehubungan adanya Pandemi Covid-19 perlu dicermati adanya potensi penerimaan daerah pada tahun mendatang serta potensi berkurangnya anggaran dari Pemerintah Pusat	BPPKAD	Melakukan <i>refocusing</i> anggaran pada APBD Tahun 2020 untuk prioritas penanganan Covid-19 dan formulasi anggaran Tahun 2021 sebagai antisipasi penanganan lanjutan Covid-19.
14	Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		
1	masih banyak terdapat Tenaga Pendidik diluar ASN yang menuntut perbaikan kesejahteraan sehingga perlu dicarikan formulasi penyelesaiannya.	BKD	Upaya peningkatan kesejahteraan Guru Non ASN telah dilakukan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu dengan meningkatkan upah tenaga Guru Non ASN (eks K-II dan Non K-II) di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dengan besaran penghasilan sebagai berikut : a. Guru kelas K-II Rp. 1.600.000,00/orang/bulan; b. Guru mapel K-II Rp. 1.500.000,00/orang/bulan; c. PTT K-II Rp.

No.	Rekomendasi	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut
			1.400.000,00/orang/bulan; d. Guru Kelas Non K-II Rp. 1.100.000,00/orang/bulan; e. Guru Mapel Non K-II Rp. 1.000.000,00/orang/bulan; f. PTT Non K-II Rp. 900.000,00/orang/bulan; g. Guru Paud/TK Rp. 750.000,00/orang/bulan.
2	keterbatasan jumlah ASN, maka perlu adanya Pemanfaatan Teknologi dan optimalisasi dari jumlah ASN yang ada	BKD	Keterbatasan jumlah ASN secara bertahap mulai tercukupi dengan penambahan ASN baru tahun 2020 sejumlah 314 CPNS yang terdiri : a. Tenaga Teknis 76 orang, b. Tenaga Guru 166 orang dan c. Tenaga Kesehatan 85 orang Serta ASN PPPK sejumlah 358 orang yang terdiri : a. Tenaga Guru : 286 b. Penyuluh Pertanian (Teknis): 68 c. Tenaga Kesehatan : 4 orang Upaya lain dalam mengatasi keterbatasan jumlah ASN adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada di Perangkat Daerah, baik pemenuhan <i>hardware</i>, <i>software</i> maupun pelatihan dalam mengaplikasikannya.
15	Urusan Pengawasan		
1	ketepatan pelaporan LHKPN dan penyelesaian tunggakan pajak yang belum terselesaikan dan masih menjadi catatan	Inspektorat	1. Dari 50 Wajib Lapor yang sudah melaporkan LHKPN sebanyak 44 Wajib Lapor (88%) 2. Terkait dengan penanganan tunggakan pajak daerah belum dapat ditindaklanjuti pada tahun 2020 karena adanya wabah corona dan akan segera ditindaklanjuti pada tahun 2021

No.	Rekomendasi	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut
16	Urusan Hukum dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan		
	1 melakukan pendataan dan inventarisasi seluruh Produk Hukum yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk dilakukan penyederhanaan peraturan Perundang-undangan.	Bagian Hukum	Pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan kerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengkajian peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah yang ada di Kabupaten Wonosobo kurun waktu 2014-2020. Kajian peraturan daerah tersebut dilaksanakan untuk menginventarisasi peraturan daerah di kabupaten yang masih berlaku maupaun yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat
	2 terbitnya Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa pembentukan Peraturan Daerah harus melalui tahapan Harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta proses Fasilitasi di tingkat Gubernur maka perlu adanya penjadwalan dengan efisien agar Raperda yang di bahas dapat diselesaikan tepat waktu	Bagian Hukum	1. pembahasan Raperda diawali dengan penetapan propemperda, serta pembahasan penjadwalan bersama badan musyawarah DPRD. Pembahasan Raperda diusulkan untuk dibahas sebanyak 3 kali sesuai masa sidang DPRD. Sehingga diharapkan pembahasa nraperda dapat dilaksanakan tepat waktu serta memenuhi prosedur pembentukan perda. 2. Melaksanakan koordinasi yang intensif dan kerja sama penyusunan Naskah akademik dan Raperda sehingga prosedur penyusunan Raperda melalui harmonisasi dapat diselesaikan tepat waktu dan efisien
17	Urusan Administrasi Pemerintahan		
	1 peningkatan kinerja Pemerintahan Desa secara umum		
	a perlu adanya Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) dalam rangka identifikasi jumlah Perangkat Desa yang ada di Kabupaten Wonosobo.	Dinsospermasdes	Untuk pemberian Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) sampai saat ini sudah dilakukan pendataan, dan rencana untuk penetapan NIPD masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari

No.	Rekomendasi	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut
			Kementerian Dalam Negeri.
	b perlu adanya Parameter untuk mengukur kinerja Perangkat Desa melalui sistem aplikasi E-kinerja.	Dinsospermasdes	a. Tahun 2020, pengembangan sistem informasi desa sebagai sistem penopang untuk meningkatkan kualitas pemerintah dan aparatur desa yang profesional dan transparan. b. Penyusunan raperbup tentang pengaturan jam kerja, seragam kerja serta cuti bagi Kades dan Perangkat Desa yang di dalamnya juga akan mengatur kinerja bagi Kades dan Perangkat Desa sebagai bahan untuk penyusunan pemberian dan besaran penghasilan tetap bagi Kades dan Perangkat Desa.
2	Guna mengantisipasi permasalahan yang timbul, terkait dengan Tanah Bengkok maka perlu adanya inventarisasi Aset Desa serta dilakukan sertifikasi Tanah Bengkok dalam rangka untuk menjamin kepastian Hukum tentang Aset Desa	Dinsospermasdes	- Desa-desa di Kab. Wonosobo telah menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa dari Kemendagri yang saat ini digunakan untuk inventarisasi aset desa, beroperasi secara offline dan berbasis desktop, sehingga belum dapat menyajikan data agregat se-kabupaten. - Terkait sertifikasi tanah aset desa, karena merupakan kewenangan pemerintah desa, kabupaten dan kecamatan hanya dapat merekomendasikan kegiatan penyertifikatan tanah kas desa saat melakukan evaluasi RAPBDesa. Beberapa desa telah memanfaatkan moment PTSL untuk menyertifikatkan tanah aset desa, karena melalui PTSL ini prosesnya lebih cepat dan biayanya lebih murah.
18	Tugas Pembantuan		

No.	Rekomendasi	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut
1	Agar Pemerintah Daerah memenuhi ketentuan pasal 22 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa "Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersamaan dengan penyampaian rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD dalam dokumen yang terpisah". Apabila ketentuan ini dilaksanakan maka akan cukup waktu bagi Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan tersebut	BPPKAD	Selama ini, perangkat daerah yang mendapatkan alokasi Tugas Pembantuan tidak pernah melaporkan pagu kegiatan Tugas Pembantuan kepada TAPD dalam T-1 penetapan APBD sehingga TAPD tidak mendapatkan informasi terkait Tugas Pembantuan. Rekomendasi tersebut sudah disampaikan kepada seluruh perangkat daerah.